



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JULI PADMI HANDAYANI
2. Jabatan : CAMAT
3. NHK : 281579

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.036.100.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 535 m2/500 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 802.500.000
2. Tanah Seluas 304 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 273.600.000
3. Tanah Seluas 1.030 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 920.000.000
4. Tanah Seluas 2.500 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Tanah Seluas 752 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
6. Tanah Seluas 1.714 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
7. Tanah Seluas 1.878 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 242.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU XENIA Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
2. MOTOR, YAMAHA N MAX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000



3. MOTOR, HONDA BEAT MATIC Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
6.000.000

4. MOTOR, SUZUKI SMASH BEBEK Tahun 2003, HASIL SENDIRI
Rp. 1.000.000

5. MOTOR, KAWASAKI 2 TAG Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
15.000.000

6. MOBIL, HONDA BRIO SATYA 1.2 E CVT CKD Tahun 2023, HASIL
SENDIRI Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 33.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 159.218.457

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 4.470.318.457

III. HUTANG Rp. 145.700.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.324.618.457

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.